

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pengertian Penerapan

Penerapan menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

- a) Adanya program yang dilaksanakan
- b) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut
- c) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.<sup>1</sup>

Adapun peranan etika adalah sebagai moralitas, etika membimbing tingkah laku manusia agar dapat mengelola kehidupan ini dengan lebih baik. Disamping itu, etika juga memberikan ukuran terhadap tindakan manusia di dalam tata kehidupan sehari-hari, baik antar pribadi, antar kelompok, maupun antar profesi. Etika membantu mengatasi konflik-konflik dan mencegah meluasnya tindakan immoral atau tidak bermoral. Serta sebagai ilmu pengetahuan, etika memberikan pemenuhan terhadap keingintahuan manusia dan menuntut manusia untuk dapat berperilaku secara kritis dan rasional.

Adapun penerapan yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren disini adalah:

- a) Manusia hidup dalam jajaran norma moral, religious, hukum, kesopanan, adat istiadat dan permainan. Oleh karena itu, manusia harus siap mengorbankan sedikit kebebasannya.

---

<sup>1</sup>Peter salim dan Yenny Salin, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), 1598

- b) Norma moral memberikan kebebasan bagi manusia untuk bertindak sesuai dengan kesadaran akan tanggungjawab (*human act*) dan bukan *an act of man*. Mentaati norma moral berarti menaati diri sendiri, sehingga manusia menjadi otonom dan bukan heteronom.
- c) Sekalipun sudah ada norma hukum, etika tetap diperlukan karena norma hukum tidak menjangkau wilayah abu-abu, norma hukum cepat ketinggalan zaman, sehingga sering terdapat celah-celah hukum, norma hukum sering tidak mampu mendeteksi dampak secara etis dikemudian hari, etika mempersyaratkan pemahaman dan kepedulian tentang kejujuran, keadilan dan prosedur yang wajar terhadap manusia dan masyarakat. Ada legalitas harus tunduk pada asas moralitas.
- d) Mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang tertib, teratur, damai dan sejahtera.
- e) Penanaman nilai etika sosial dan budaya juga dimaksudkan agar tercipta masyarakat yang memiliki etika sosial yang baik (menjunjung norma, hukum, dan nilai-nilai kesopanan yang berlaku pada masyarakat) dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsanya serta melestarikan budaya-budaya bangsa agar tercipta masyarakat yang memiliki jati diri sehingga identitasnya sebagai bangsa Indonesia yang memiliki etika sosial dan budaya tercermin pada setiap diri warga Negara.<sup>2</sup>

Faktor penghambat dan pendukung dalam mempengaruhi penerapan etika sosial Pondok Pesantren Darus Sa'adah disini adalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Universitas Gunadharma, *Pancasila Sebagai Sistem Etika*, <http://wartawarga.guna.darma.ac.id/2010/04/pancasila-sebagai-sistem-etika/>, diakses tanggal 28 Juli 2022, pukul 20.31 WIB. Jurnal Universitas Negeri Malang. Pembelajaran Nilai, Norma, dan Moral dalam PPKN. <http://journal/um.ac.id/index.php/ppkn/article/view/1716>, diakses pada tanggal 28 Juli 2022, pukul 20.31 WIB

- a. Faktor penghambat
  - 1) Kurangnya iman dari individu
  - 2) Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai kode etik pada setiap bidang, karena belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari orang tersebut.
  - 3) Tidak ada pedoman hidup dari individu tersebut
  - 4) Perilaku dan kebiasaan individu yang buruk sehingga menjadi sebuah kebiasaan

Adapun yang menjadi faktor penghambat hubungan pondok dengan masyarakat yaitu kurangnya penanaman masyarakat tentang pendidikan dan juga pemahaman tentang apa dan bagaimana harusnya pengelolaan hubungan pondok dengan masyarakat dibangun. Kurangnya komunikasi antara pondok dan warga masyarakat, sehingga tercipta komunikasi satu arah antara pondok pesantren dan warga masyarakat dan pada akhirnya pondok pesantren tiak tahu keinginan masyarakatnya tetapi memaksakan keinginannya pada masyarakat yang saat ini hanya terlibat pada aspek pembiayaan saja.

- b. Faktor pendukung

- 1) Kiai

Kiai adalah yang paling utama dalam menumbuhkan kecerdasan sosial santri. Di pondok pesantren ini kiai mengajarkan bagaimana kita harus menghadapi masyarakat yang baik dan sopan. Tidak hanya mengajarkan tetapi juga memberikan contoh. Dari situ para santri juga banyak yang berubah.

- 2) Kesadaran diri sendiri

Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengakui, mengenal perasaan diri ataupun keadaan dimana seseorang bisa memahami dirinya sendiri dan juga merupakan syarat agar kita dapat bekerja dengan orang lain secara efektif. Sama halnya dengan para santri di sini diminta kesadaran diri karena mereka juga telah dewasa dalam mengolah waktu, tanggung jawab pun harus sudah belajar dari diri sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Silviana, umi Interview. 2022, “Wawancara di Pondok Pesantren Darus Sa’adah” Hadipolo Jekulo Kudus.

## 2. Etika Sosial

Makna etika dalam kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral, sekumpulan azas atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak, nilai yang mengenai benar atau salahnya perbuatan atau perilaku yang dianut masyarakat.<sup>4</sup> Sedangkan arti etika sosial itu sendiri adalah pengalaman yang dilakukan oleh seseorang akan nilai-nilai yang diyakini baik (terpuji), buruk (tercela) dan terpercaya sehingga atas tindakan tersebutlah memunculkan makna tersirat pada pihak lain (seorang atau kelompok).

Kata sosial berasal dari bahasa latin yaitu “Socius” yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan. Sosial berarti mencakup banyak dan berkesinambungan serta ketergantungan, bekerja sama. Winandi mendefinisikan striktur sosial sebagai seperangkat hubungan diantara unsur-unsur tertentu. Dapat disimpulkan bahwa sosial adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama.<sup>5</sup>

- a. Menurut A. Qodri A. Azizy etika sosial adalah filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggungjawab manusia sebagai anggota umat manusia. Menurut beliau, etika sosial juga membicarakan kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia, yang artinya secara sadar semua berpangkal dari hati nuraninya seseorang harus merasa berkewajiban untuk berbuat baik untuk kepentingan manusia yang lain disamping kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan pribadi dalam pengertian egois dan merugikan orang lain.

Qodri Azizy memahami etika sosial sebagai bentuk perilaku kehidupan yang berupa aturan-aturan atau norma atau moral, baik yang berasal dari adat istiadat suatu

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 115

<sup>5</sup><http://www.landasanteori.com/> diakses 31 Juli 2022 pukul 00.01 WIB

masyarakat dan atau bersumber pada agama yang berlaku dalam masyarakat.<sup>6</sup>

b. Abdurrahman Wahid

Gagasan etika sosial dalam pemikiran Abdurrahman Wahid bermula dari pemaknaan atas konsep akhlak dalam islam yang ia pahami tidak sebagai akhlak individu. Tetapi sebagai akhlak yang bersifat sosial, karena bagi Abdurrahman Wahid, islam tidak menyediakan antara normative tentang sopan-santun individu, akan tetapi menyediakan kerangka etis kehidupan masyarakat yang baik. Sebagaimana ungkapnya:

Bukanlah menjadi sangat dalam makna sabda Nabi: “Bahwasanya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak”, kemuliaan akhlak hanyalah akan terasa logis untuk disempurnakan, jika upaya itu diartikan pengembangan kesadaran mendalam akan etika sosial dari sebuah masyarakat bangsa. Tugas Islam adalah mengembangkan etika sosial yang memungkinkan tercapainya tujuan penyejahteraan kehidupan manusia.<sup>7</sup>

Komitmen etika sosial Abdurrahman Wahid berbanding lurus dengan gagasan utamanya, yaitu pribumisasi Islam, yang tidak lain adalah upaya Abdurrahman Wahid dalam rangka kontekstualisasi ajaran islam di tengah dinamika dan problematika manusia. Dengan cara ini Islam benar-benar menjad jawaban setiap problematika kebangsaan tanpa kehilangan spirit etisnya sebagai agama yang agung.<sup>8</sup>

Abdurrahman Wahid memahami tugas kemanusiaan sebagai tugas kebutuhan, sementara ketuhanan Abdurrahman Wahid adalah ketuhanan berkemanusiaan yang ia tampilkan sebagai wacana dan gerakan untuk

---

<sup>6</sup> H. Afif Muhammad, “Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Etika Sosial (Telaah Pemikiran A. Qodri A. Azizy)”, JPA, Vol. 15, No. 1 (Januari- Juni 2014), 15

<sup>7</sup> Abdurrahman Wahid, “Islam dan Masyarakat Bangsa”, Jurnal Pesantren, No.3 Volume VI, 1989), 7

<sup>8</sup> Syaiful Arif, Humarnisme Gus Dur: *Pergumulan Islam dan Kemanusiaan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2013), 21

merespon perihal persoalan-persoalan kemanusiaan. Abdurrahman Wahid mampu mendorong keberpihakan keimanan terhadap masalah kemiskinan, diskriminasi dan toleransi.

c. Musa Asy'arie

Musa Asy'arie mengatakan bahwa etika sosial diperlukan dalam masyarakat yang syarat pluralitas, agar mempunyai mekanisme penyelesaian masalah yang dihadapi, berdasarkan nilai-nilai etika yang menjadi bagian fundamental dan tata kehidupan sosialnya. Melalui proses perbudayaan dan tata kehidupan sosialnya, maka pluralitas yang ada akan menjadi bagian dari proses perekat dan memperkaya hubungan emosional dari berbagai kelompok sosial. Etika sosial dibangun dari akar agama dan kebudayaan yang menjadi bagian fundamental kehidupan masyarakat turun-temurun dan selalu diaktualisasikan secara kreatif dan kontekstual sesuai dengan perubahan masyarakat dalam berbagai aspeknya. Lalu Musa Asy'arie membagi etika sosial itu menjadi tiga prinsip, pertama, persamaan dan kebersamaan, kedua keadilan sosial, ketiga keterbukaan dan musyawarah.

d. Hamka

Hamka menjelaskan konsep etika sosialnya berangkat dari struktur eksistensial manusia. Manusia dalam sirinya memiliki daya dan kekuatan-kekuatan tertentu yang kemudian mempengaruhi tingkah laku. Daya-daya itu adalah daya akal, daya marah, dan daya syahwat. Menurut Hamka ketiga daya ini yang selalu mempengaruhi suasana manusia sehingga berdampak pada tindakannya. Namun begitu, manusia juga memiliki kekuatan suara hati yang dapat menuntun manusia ke jalan benar, tentunya bila manusia mengikuti bisikan-bisikannya.<sup>9</sup>

Menurut Hamka perbuatan manusia adalah perbuatan yang merdeka. Perbuatan manusia tidak diciptakan seperti gerakan boneka, manusia yang

---

<sup>9</sup> Muhammad Abduh Almanar, *Pemikiran Hamka: Kajian Filsafat dan Tasawuf*, (Jakarta: Prima Alsara, 1996), 53

menggerakkan dirinya sendiri. Hamka memperkuat bangunan pemikiran etika sosialnya mulai dari pandangan bahwa penilaian tentang yang baik dan buruk harus dibangun atas pondasi tauhid. Dengan pandangan tersebut, maka konsep etika sosial Hamka merupakan etika religious, tetapi pada waktu yang sama, etika Hamka dipaparkan secara rasional dan kritis.<sup>10</sup>

e. Usman Sunyoto

Definisi etika sosial menurut Usman Sunyoto adalah;ah pengalaman yang dilakukan oleh seseorang akan nilai-nilai yang diyakini baik (terpuji), buruk (tercela) dan terpercaya sehingga atas tindakan tersebutlah memunculkan makna tersirat kepada pihak lain (seseorang/kelompok).

Dari definisi tersebut Usman Sunyoto ingin memberi gambaran bahwa dalam bermasyarakat yang tentunya sudah punya tatanan seharusnya, dipraktikkan dan indahkan serangkaian-serangkaian tindakan akan penerapan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat.

f. Burhanuddin Salam

Pegertian etika sosial secara spesifik diartikan oleh Burhanuddin Salam, bahwa etika sosial adalah berbicara mengenai kewajiban, sikap dan perilaku sebagai anggota masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai sopan santun, yaya karma dan saling menghormati, yaitu bagaimana saling berinteraksi yang berhubungan dengan manusia, baik secara per individu atau kelompok, secara langsung kebutuhan dasar individu, suatu kepercayaan dalam penerapan ilmunya untuk menerima “milik pribadi” tersebut.

Tujuan dan fungsi dari etika sosial pada dasarnya adalah untuk mengunggah kesadaran kita akan tanggungjawab kita sebagai manusia dalam kehidupan bersama segala dimensinya. Etika sosial itu sendiri ingin mengajak kita untuk tidak melihat segala sesuatu dan bertindak dalam rangka kepentingan kita saja. Melainkan juga memperdulikan kepentingan bersama, dalam bidang

---

<sup>10</sup> Abd. Chair, *Pemikiran Hamka dalam Bidang Akidah, Tasawuf dan Sosial Politik*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1997), 34

kekhususan masing-masing, berusaha merumuskan prinsip-prinsip moral dasar yang berlaku untuk bidang khusus tersebut.<sup>11</sup>

Etika sosial menyangkut hubungan dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan (keluarga, masyarakat, Negara), sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia dan ideologi-ideologi maupun tanggungjawab manusia terhadap lingkungan hidup.

Etika sosial merupakan suatu etika sehubungan dengan relasi manusia dengan sesamanya dalam sosietas (masyarakat). Etika sosial menunjukkan pada etika yang berkenaan dengan suatu sosietas yang secara khusus berhubungan dengan pengaturan secara normative relasi-relasi sosial dalam rangka tatanan hidup bersama. Yang diurusi oleh etika sosial tidak berbeda dengan kesibukan etika sendiri sebagai suatu cabang dari filsafat.<sup>12</sup>

Nurcholish Madjid adalah salah satu tokoh pembaharu Islam atau salah satu tokoh pembaharu modern di Indonesia menurut beliau yang dimaksud dengan etika sosial adalah etika anggota masyarakat mampu hidup dengan kesenangan yang tertunda, dengan tidak menuruti atau mengamini keinginan diri sendiri yang egoistic dan individualistic. Menurut Nurcholish Madjid untuk mencapai tegaknya etika sosial itu diperlukan ikatan batin atau komitmen terhadap nilai-nilai budi pekerti luhur kemasyarakatan, tidak hanya sebatas perorangan.<sup>13</sup>

Pada hakikatnya etika sosial membahas tentang relasi manusia dengan semuanya dalam *societas* (masyarakat). Pada dasarnya, manusia hidup tidak mungkin tanpa rasa dimensi kedalaman tertentu, yang menyentuh emosi dan jiwanya, jika tidak boleh disebut ruhaninya yang bisa dinyatakan dalam keharuan, ketidakkeberdayaan diri atau keinfasan sebagai tenggelam dalam “keseleruhan yang meliputi”. Agama mengajarkan bahwa masing-masing

---

<sup>11</sup> Burhanuddin Salam, *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 8-9

<sup>12</sup> Xaverius Chandra, *Bahan Ajaran Etika Sosial*, (Surabaya: 2016), 3

<sup>13</sup> Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat* ( Jakarta Selatan: Paramadina, 1999), 32



pribadi manusia mempunyai harkat dan martabat yang senilai dengan manusia sejagad.

Dalam etika sosial lebih mudah timbul berbagai pandangan dibandingkan etika yang lain. Norma-norma harus selalu diterapkan oada keadaan yang konkrit. Setiap norma menyamakan kewajiban. Kewajiban yang paling umum itu melakukan kebaikan.<sup>14</sup>

Etika sosial merupakan fondasi yang penting di dalam pergaulan, serta menjadi landasan penting bagi peradaban yang akan menjadi kesan mendalam dan terus terpatri di benak tiap individu itu sendiri. Etika sosial harus berlandaskan pada cita-cita keadilan dan kebebasan bagi individu untuk melakukan kebaikan. Etika sosial adalah sebuah pandangan moralitas agama yang mengarahkan manusia untuk berbuat baik antar sesamanya agar tercipta masyarakat yang baik dan teratur.

Adapun dimensi-dimensi etika sosial adalah sebagai berikut:

a. Dimensi Agama

Peran agama sebagai masyarakat menempati peran yang utama. Dalam pandangan sosiologis agama bias dilihat dari dua segi, yaitu: pertama, agama-agama selalu mengajar prinsip moral yang tinggi dan menjunjung tinggi disiplin, kerja keras dan kebijakan sosial lain yang mendukung stabilitas dan keamanan masyarakat. Artinya, agama mengikat masyarakat secara bersamaan dan menciptakan simbol-simbol yang mengekspresikan visi paling mulia dari suatu masyarakat sehingga masyarakat diajar oleh agama menjadi pasrah dan tunduk kepada pemerintah. *Kedua*, agama berperan sebagai semangat luar biasa kuat untuk perubahan sosial. Agama yang dinamis dan kreatif ini, tidak menjaga *status quo*, tetapi menyampaikan visi sosial masyarakat sebagai bagian kontrol pemerintahan yang bias mengkritik dan mengevaluasi sistem pemerintahan. Agama seperti ini tidak menjaga stabilitas dan keamanan tetapi justru menggoyang stabilitas dan mungkin membuka pintu

---

<sup>14</sup> Achmad Charis Zubair, *Kuliah Etika* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 105

untuk revolusi. Dari dua sisi pandangan tersebut diatas, agama seakan-akan menempati dualism yang dilematis. Oleh karena itu lebih penting adalah menempatkan peran agama pada posisi yang seimbang antara idealisme dan realisme keagamaan.

Di sisi lain terlepas dari permasalahan diatas, tantangan kultural keagamaan yang paling mendesak saat ini yakni bagaimana menciptakan masyarakat yang lebih santun dan juga membebaskan masyarakat dari lingkungan kesengsaraan sosial dan rohmaniah. Oleh sebab itu menurut weber diperlukan suatu bentuk penerjemah ide-ide keagamaan yang ideal itu dalam kehidupan praktis sambil memperhitungkan segala kendala tradisi atau kapasitas formal yang ada dalam masyarakat. Nampaklah bahwa peran agama bukan saja *amar ma'ruf nahi mungkar*, tetapi juga adanya kekritisian terhadap perubahan-perubahan dinamika masyarakat. Bagaimana menumbuhkan kesadaran komitmen kepada pluralisme dan menjaga toleransi sebagai permasalahan yang prinsip, bukan hanya procedural semata. Oleh karena itu, sikap dan prilaku harus didasarkan pada moralitas agama yang otentik dalam kehidupan bermasyarakat yang diwujudkan dengan etika sosial bukan prilaku dengan hanya menuruti peranan sosiologisnya yang menimbulkan sentiment kelompok, baik kelompok keagamaan, kesukuan, kedaerahan, dan lain sebagainya. Tapi pada kepentingan bersama berdasarkan asas keadilan sosial dan juga sikap menghargai perbedaan dengan pangkal tolak utama terwujudnya demokrasi dalam masyarakat yang bermoral.

b. Dimensi Kultural (Cultural)

Budaya atau kultural merupakan system yang berkaitan dengan ide-ide dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang pada level terendah mengandung makna kesadaran intuitif dari identitas nilai yang harus diwujudkan. Sedangkan pada level tertinggi, kesadaran akan nilai ini meniratkan pengetahuan yang luas akan nilai-nilai, hubungan timbal balik dan tingkatan-tingkatannya, dan sejarah proses

perkembangan yang dengannya akan dicapai perwujudan kesemestaan nilai itu.<sup>15</sup> Wilayah budaya sebagai tempat eksistensi kebudayaan merupakan sebuah persekutuan yang anggota-anggotannya mentaati suatu kerangka ide dan nilai-nilai yang sama untuk menjaga kehidupan yang harmonis dan menghindari adanya anarki.<sup>16</sup> Oleh sebab itu dalam wilayah budaya ini terdapat ketentuan-ketentuan hukum dan taat aturan untuk mengarahkan berbagai kebiasaan yang menjadi konsesus dan mengontrol konflik-konflik yang timbul di dalamnya, sehingga dalam wilayah budaya ini mempunyai kesamaan konsesus antara anggota-anggotanya untuk menciptakan konsep moral tentang baik dan buruk, bermanfaat atau merugikan.

Hal ini sebagaimana digambarkan Edward B Taylor dalam bukunya *Primitive Cultural* yang terbit tahun 1871 yang dikutip sebagai berikut:

“Budaya atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat”.<sup>17</sup>

Dari definisi sederhana ini akan berimplikasi dalam usaha mendapatkan pengertian yang jelas mengenai hakikat kebudayaan yaitu, *pertama*, adanya keteraturan dalam hidup bermasyarakat, *kedua*, adanya proses pemanusiaan dan *ketiga*, dalam proses pemanusiaan itu terdapat suatu visi tentang kehidupan. Ketiga hakikat kebudayaan diatas merupakan unsur kebudayaan yang harus ditransmisikan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya yang tidak lepas dari nilai-nilai budaya, adat istiadat masyarakat dan pandangan mengenai hidup. Hal

---

<sup>15</sup> Faruqi, Ismail R, *Islam dan Kebudayaan, Terj. Yustiono, Penyunting Jalaludin Rachmat*, (Bandung: Mirzan, 1984), 7

<sup>16</sup> Muslim, Abdurrahman, *Islam Transformatif*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 173

<sup>17</sup> Tilaar, H.A.R, *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), 39

ini nampaknya satu peranan yang diemban pendidikan. Proses transmisi yang berupa imitasi, identifikasi dan sosialisasi merupakan suatu tantangan, bagaimana pengaruh luar yang masuk dan mempengaruhi masyarakat dapat tersaring, sehingga budaya yang dipengaruhi tidak merubah status nilai-nilai yang dipertahankan tetai malah memperluas cakrawala untuk mewujudkan nilai-nilai global yang diwujudkan dalam etika sosial.

#### c. Dimensi Ekonomi

Kerangka dasar masyarakat pada umumnya adalah ekonomu dengan system sosial yang didasarkan atas kesamaan dan keadilan serta dilandasi dengan etika dan moral ekonomi, yaitu sifat yang tidak pernah mengkompromikan antara yang diperbolehkan (halal) dengan dilarang (haram).<sup>18</sup> Tetapi ekonomi yang membolehkan hal-hal yang baik dan melarang yang buruk.<sup>19</sup>

Sistem ekonomi yang dikembangkan dalam masyarakat bukanlah sistem liberlisme atau kapitalisme, dan bukan pula sistem sosialisme murni, yang membawa masyarakat tanpa kelas (*classless society*). Tetapi merupakan system yang bercirikan kewarganegaraan (*citizenship*), persamaan kesempatan (*equality of opportunity*), kegotongroyonan (*collectivisme*) dan masyarakat korporat, yakni sistm ekonomi didukung dan mencerminkan kepentingan semua kelompok. Sehingga dapat dikatakan bercorak sosial ekonomi.<sup>20</sup>

#### d. Dimensi Politik dan Hukum

Dimensi politik dalam masyarakat senantiasa mencakup lingkaran hokum dan Negara. Kelembagaan ini didukung oleh sistem-sistem nilai dan ideology-idiologi yang sama memberikan legitimasi kepadanya. Oleh sebab itu lembaga penata normative masyarakat adalah hokum. Hukum sebagai alat kontrol yang terdiri

<sup>18</sup> Muhammad A, Al-Buraay, (Jakarta: Rajawali, 1986), 194

<sup>19</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Serajaya Sentra, 1986)

<sup>20</sup> M. Dawam, Rahardja, "Agama dan Masyarakat Madani", Makalah Seri Dialog Kebudayaan 1: "Agama dan Masyarakat Madani", Oleh LSAF dan KOMPAS Bekerjasama dengan Paramadina, (Jakarta, 13 Desember 1996)

dari norma-norma yang menjadi pegangan anggota masyarakat bertindak. Artinya masyarakat dapat dijamin oleh hukum, apakah tindakan yang dilakukan benar atau salah, sistem hukumlah yang menjawabnya.

Dalam Islam tidak terdapat pemisahan antara politik dan etika (moralitas). Hal ini dikarenakan tatanan politik yang dibangun masyarakat bahwa seluruh perilaku individu dalam masyarakat, selalu taat dan patuh pada tatanan politik, sehingga dapat mengetahui dan membedakan perilaku politik yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan, dengan perilaku yang mendatangkan keburukan dan kerugian. Dengan kemampuan membedakan tersebut, seseorang akan dapat menuntun Negara mencapai tujuan utama yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kemakmuran bagi warganya.<sup>21</sup>

Dimensi politik dan hukum, dapat menjadi penentu kekuatan masyarakat dan sebagai alat penentu kebijakan pemerintah untuk mengatur tata kemasyarakatan. Dengan landasan moral-etika, system politik dan huku menjadikan Negara-negara menuju tata kehidupan yang menegakkan keadilan dan kebenaran, *amar ma'ruf nahi munar*.

e. Dimensi Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu syarat pemberdayaan masyarakat. Pendidikan yang mewarnai dimensi-dimensi dalam masyarakat baik segi ekonomi,<sup>22</sup> sosial politik, hukum, budaya dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan pendidikan memegang fungsi dialektik terhadap masyarakat, artinya pendidikan selain menjadi bagian masyarakat juga mempengaruhi masyarakat dan hasil dari pengaruh pada masyarakat itu berpengaruh lagi pada pendidikan.

---

<sup>21</sup> Muhammad A, Al-Buraay, *Administrative Development: An Islamic Prespective*, Terj. Ahmad Nasir Budiman. *Islam: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali, 1986), 156-157

<sup>22</sup> Imam, Bernadib, *Dasar-Dasar Kependidikan: Memahami Makna dan Perspektif Beberapa Teori Pendidikan*, (Jakarta: Ghalia Indoneisa, 1996)

Keterkaitan pendidikan dengan masyarakat, dapat diamati pertama, bahwa antara masyarakat dan pendidikan saling merefleksi. Masyarakat mempunyai kebudayaan, kebudayaan pun merefleksikan pada pendidikan. Kedua, masyarakat dalam hal biasa (konkrit) ataupun dalam rangka berubah dan berkembang menghendaki peranan pendidikan untuk membawa perubahan dan perkembangan itu, dan ketiga, masyarakat yang telah berfungsi seperti yang dikembangkan oleh pendidikan itu selanjutnya merefleksi lagi terhadap pendidikan dan pendidikan mempunyai tugas untuk pengembangan lebih lanjut.

Ketika manjalin sebuah hubungan sosial di masyarakat maka diperlukan sikap saling memahami dan mengerti akan keadaan masyarakat tersebut. Seseorang tidak akan mendapatkan hasil bersifat menguntungkan apabila orang tersebut tidak mau menghargai dan menghormati perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat. Sikap saling menghargai dan saling toleran harus menjadi prioritas, terutama dalam konteks plural dan multicultural. Pemahaman atas pentingnya toleransi harus menjadi sebuah keniscayaan dalam rangka membangun masa depan yang lebih bermakna dan ketika cara itu diterapkan maka kehidupan akan menjadikan lebih berharga dan sebaliknya ketika nilai-nilai toleransi, maka kebersamaan, keharmonisan, dan kerukunan akan menjadi suatu hal yang fana.

Hubungan sosial merupakan dasar manusia, manusia mungkin tidak dapat meniadakan interaksi mereka dengan manusia lain. Sayangnya realitas menunjukkan bahwa beberapa orang ketika membangun hubungan, lupa bahwa ada perbedaan antara mereka, tetapi perbedaan adalah sesuatu yang mustahil dihilangkan dalam hubungan sosial, toleransi diperlukan untuk mempertahankan perdamaian dan kebahagiaan secara sistematis.<sup>23</sup> Masing-masing pribadi manusia mempunyai nilai kemanusiaan yang universal. Maka, kejahatan kepada seorang pribadi adalah

---

<sup>23</sup>Jurnal Pemikiran Islam, Islam dan Krurkunan Umat, Vol 18 No 2 (3013)  
Diakses pada: 22/07/2022 pukul 10:06 WIB

sama dengan kejahatan kepada manusia sejagad, dan kebaikan kepada seorang pribadi sama dengan kepada kebaikan manusia sejagad. Inilah dasar yang amat tegas dan tandas bagi pandangan kewajiban manusia untuk menghormati sesamanya dengan hak-hak asasinya yang sah.<sup>24</sup>

### 3. Santri Pondok Pesantren

#### a. Pengertian Santri

Kata santri menurut C. C Berg berasal dari bahasa India, *Shastri* yaitu orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Sementara itu, A. H. John menyebutkan bahwa istilah santri berasal dari Bahasa *Tamil* yang berarti guru mengaji.<sup>25</sup> Nurcholish Madjid juga memiliki pendapat berbeda. Dalam pandangannya asal usul kata “santri” dapat dilihat dari dua pendapat. *Pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa “santri” berasal dari kata “*sastri*”, sebuah kata dari bahasa Sansekerta yang artinya melek huruf. Pendapat ini menurut Nurcholish Madjid didasarkan atas kaum santri kelas literary bagi orang Jawa yang berusaha mendalami agama melalui kitab-kitab bertulisan dan berbahasa Arab. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa perkataan santri sesungguhnya berasal dari bahasa Jawa dari kata “cantrik” berarti seseorang yang selalu mengikuti seorang guru kemana guru ini pergi menetap.<sup>26</sup>

Santri adalah sekelompok orang yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan ‘ulama’. Santri adalah siswa atau mahasiswa yang dididik dan menjadi pengikut dan pelayan perjuangan ‘ulama’ yang setia. Pondok pesantren didirikan dalam rangka pembagian tugas mu’minin untuk *iqomatuddin*, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 122.

---

<sup>24</sup> Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*, Cet 2 (Jakarta Selatan: 2009), 157-160

<sup>25</sup> Babun Suharto, *Dari Pesantren Untuk Umat: Reiventing Eksistensi Pesantren di Era Globalisasi* (Surabaya: Imtiyaz, 2011), 9

<sup>26</sup> Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholish Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 61

Yang artinya: tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Bagian pertama ayat ini menjelaskan keharusan adanya pembagian tugas mu'minin untuk *iqomatuddin*. Bagian kedua yaitu kewajiban adanya *nafar*, *tho'ifah*, kelompok, lembaga atau jama'ah yang mengkhususkan diri untuk menggali ilmuddin supaya *mufaqiqh fiddin*. Bagian ketiga mewajibkan kepada insan yang *tafaqquh fiiddin* untuk menyebarkan ilmuddin dan berjuang untuk *iqomatuddin* dan membangun masyarakat masing-masing. Dengan demikian, *sibghah* predikat santri adalah julukan kehormatan, karena seseorang bisa mendapat gelar santri bukannya semata-mata karena sebagai pelajar atau mahasiswa, tetapi karena ia memiliki akhlak yang berlainan dengan orang awam yang ada disekitarnya. Buktinya adalah ketika ia keluar dari pesantren, gelar yang ia bawa adalah santri dan santri itu memiliki akhlak dan kepribadian tersendiri.<sup>27</sup> Penggunaan istilah santri ditujukan kepada orang yang sedang menuntut pengetahuan agama di pondok pesantren. Sebutan santri senantiasa berkonotasi mempunyai kiai.<sup>28</sup> Para santri menuntut pengetahuan ilmu agama kepada kiai dan mereka bertempat tinggal di pondok pesantren. Karena posisi santri yang seperti itu maka kedudukan santri dalam komunitas pesantren menempati posisi superordinat.

Santri adalah para siswa yang mendalami ilmu-ilmu agama di pesantren baik dia tinggal di pondok maupun setelah selesai waktu belajar. Zamakhsyari Dhofier

---

<sup>27</sup>Abdul Qodir Jailani, *Peran Ulama dan Santri* (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), 7-8

<sup>28</sup>Sukanto, *Kepemimpinan kiai dalam Pesantren* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1999), 97



membagi menjadi dua kelompok sesuai dengan tradisi pesantren yang diamatinya, yaitu:

- 1) Santri Mukim, yakni para santri yang menetap di pondok, biasanya diberikan tanggung jawab mengurus kepentingan pondok pesantren. Bertambah lama tinggal di pondok, statusnya akan bertambah, yang biasanya diberi tugas oleh kiai untuk mengajarkan kitab-kitab dasar kepada santri-santri yang lebih junior.
- 2) Santri Kalong, yakni santri yang selalu pulang setelah selesai belajar atau kalau malam ia berada di pondok dan kalau siang pulang kerumah.<sup>29</sup>

#### **b. Pengertian pondok pesantren**

Pesantren secara harfiah berasal dari kata *Santri* yang terdapat awalan *pe-* dan akhiran *-an* yang memiliki pengertian tempat tinggal para santri. Kata “santri” sendiri, *Shastri*, yaitu seseorang yang mengerti berbagai kitab suci agama atau orang yang telah sarjana ahli kitab suci. Dalam Bahasa Arab pesantren berasal dari kata *Funduq*, yang diterjemahkan sebagai, rumah, hotel, asrama atau tempat tinggal yang sederhana. Dengan demikian, pesantren merupakan tempat santri menginap dan menimba keilmuan.<sup>30</sup>

Pondok pesantren secara istilah adalah tempat tinggal sementara atau sebuah asrama dan madrasah yang dipakai untuk kebutuhan belajar, pendalaman, pemahaman, dan pengalaman ajaran agama islam dan didalamnya terdapat tokoh yang bertindak atau bertugas sebagai pengajar yaitu kyai atau bunyai, ustadz, ustdzah, serta santri dan juga ada tempat untuk belajar dan masjid sebagai pusat untuk berdakwah.<sup>31</sup> istilah pondok

<sup>29</sup>Harun Nasutionet. Al, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Depag RI, 1993), 1036

<sup>30</sup> Hariya Toni, “Pesantren Sebagai Potensi Pengembangan Dakwah Islam”, *Jurnal Dakwah dan Kominikasi*, 1, no. 1, (2016), 3, diakses pada 05 Oktober 2021,

[https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=pesantren+sebagai+potensi+pengembangan+dakwah+islam&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pesantren+sebagai+potensi+pengembangan+dakwah+islam&btnG=)

<sup>31</sup> Siti Maratus Salamah, *Strategi Pengembangan Dakwah Pondok Pesantren Al-Isti'anah Dalam Memperbaiki Prilaku Sosial Masyarakat di Desa Jombor*

pesantren banyak dikemukakan oleh beberapa tokoh. Tokoh tersebut diantaranya:

- 1) Pesantren menurut A. Halim merupakan pranata pendidikan Islam dengan seorang kyai sebagai pimpinan atau pengasuh pondok pesantren dan didukung kinerjanya oleh para ustadz atau ustadzah, yang menyampaikan keilmuan Islam kepada santri menggunakan metode yang spesifik. Menurut Halim pesantren juga dapat hadir sebagai sarana berdakwah, yakni mendalami pengetahuan ilmu agama sekaligus pusat menyebarkan agama Islam. Karena di pesantren agama disampaikan dengan baik dan di pesantren pula ajaran keagamaan disebarkan.<sup>32</sup>
- 2) Pondok pesantren menurut Abdul Choliq adalah dua hal yang erat kaitannya dan bertujuan sama sebagai tempat tinggal (tempat istirahat) sementara guna memperdalam ilmu agama Islam.
- 3) Manfred Ziemek mendefinisikan pondok pesantren yang berasal dari kata “Funduq” yang berarti sebagai wisma sederhana atau ruang tidur karena sejatinya pondok pesantren adalah tempat sederhana bagi para pelajar yang berada jauh dari daerah asalnya.<sup>33</sup>

Dari beberapa penjelasan para tokoh diatas, peneliti sependapat dengan A. Halim karena pondok pesantren dari zaman dahulu selalu mengedepankan ilmu agama Islam dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Dan pondok pesantren tidak hanya memiliki fungsi sebagai pranata pendidikan untuk masyarakat, yakni tentang

---

*Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Tahun 2019*, (Skripsi, IAIN Salatiga, 2020), 32-33 diakses pada 03 Oktober 2021

<sup>32</sup> Latif Asyhari, *Manajemen Dakwah Mujadalah Selapan Ahad Pon di Pondok Pesantren Wasilatul Huda Gemuh Kabupaten Kendal*. (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019), 38. Diakses Pada 17 Oktober 2021, [http://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=manajemen+dakwah+mujadalah+selapan+ahad=pon&btnG=](http://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=manajemen+dakwah+mujadalah+selapan+ahad=pon&btnG=)

<sup>33</sup> Istito'ah, *Manajemen Dakwah Pondok Pesantren Al-Hikmah Pedurangan Semarang*, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019), 22 diakses pada 18 September 2021, [http://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0,5&q=manajemen+pondok+pesantren+al+hikmah+pedurangan](http://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&q=manajemen+pondok+pesantren+al+hikmah+pedurangan)

pendidikan keislaman dan juga sebagai lembaga dakwah untuk masyarakat.<sup>34</sup>

Kehadiran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan berperan sebagai lembaga pengembangan masyarakat. Pondok pesantren sendiri berpotensi untuk maju dan berkembang dalam memberdayakan diri dan masyarakat sekitarnya. Hal ini data dilihat adanya potensi dan peluang pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan diantaranya:

*Pertama*, pondok pesantren merupakan suatu lembaga yang didirikan secara mandiri dari dan untuk masyarakat, hal ini berperan penting dalam pembentukan moral bangsa. *Kedua*, adanya figur ulama yang kharismatik di pondok pesantren yang selalu disegani dan juga menjadi panutan masyarakat sekitar. *Ketiga*, jiwa kemandirian, keikhlasan dan kesederhanaan yang tumbuh dikalangan para santri dan juga keluarga besar pondok pesantren. *Keempat*, minat masyarakat cukup besar terhadap pondok pesantren, karena disampingkan diberi pendidikan agama Islam, masyarakat juga dibimbing moralnya.<sup>35</sup>

Pondok pesantren yang merupakan lembaga masyarakat, sejak keberadaanya telah mampu mengakomodasi berbagai macam perubahan, baik dalam segi structural maupun sistematika pengajarannya, setelah diamati, transformasi yang ada dalam pesantren, telah membawa lembaga ini menjadi berfungsi ganda, yaitu sebagai lembaga pendidikan agama dan lembaga pengembangan masyarakat. Itu semua dilakukan karena pertimbangan internal, di mana para pengasuh pesantren telah menyadari adanya berbagai transformasi yang ada

---

<sup>34</sup> Abdul Kholiq Syafa'at, dkk, Strategi Pengembangan Pondok Pesantren dalam Era Globalisasi di Kabupaten Banyuwangi 8, no 1, (2014): 249, diakses pada 17 September 2021, [http://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=strategi+pengembangan+pondok+pesantren+dalam+era+globalisasi+di+kabupaten+banyuwangi&btnG=](http://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=strategi+pengembangan+pondok+pesantren+dalam+era+globalisasi+di+kabupaten+banyuwangi&btnG=)

<sup>35</sup> Hariya Toni, "Pesantren Sebagai Potensi Pengembangan Dakwah Islam", Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 1, no. 1, (2016), 4-5, diakses pada 05 Oktober 2021

di Indonesia, baik sosial maupun kultural, yang diakibatkan oleh pembangunan yang cenderung mengarah pada modernisasi, industrialisasi, dan komputerisasi hampir di segala bidang kehidupan. Akibat model perkembangan seperti itu, tentu membawa pengaruh dan dampak pada sikap dan perilaku masyarakat Indonesia.<sup>36</sup>

Berdasarkan realitas tersebut, pesantren sampai saat ini memiliki pengaruh cukup kuat pada hampir seluruh aspek kehidupan di kalangan masyarakat muslim pedesaan yang taat. Kuatnya pengaruh pesantren tersebut membuat setiap pengembangan pemikiran dan interpretasi keagamaan yang berasal dari luar kaum elit pesantren tidak akan memiliki dampak signifikan terhadap *way of life* dan sikap masyarakat Islam di daerah pedesaan. Kenyataan ini menunjukkan setiap upaya yang ditujukan untuk pengembangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, perlu melibatkan dunia pesantren.<sup>37</sup>

Berbicara tentang pemberdayaan masyarakat dengan pesantren dalam konteks Indonesia, maka kehadiran pesantren menjadi suatu keniscayaan untuk dilibatkan. Sebab pesantren sejak keunculannya, memang tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat. Lembaga keagamaan ini tumbuh berkembang dan untuk masyarakat. Pesantren didirikan dengan tujuan mengadakan transformasi sosial bagi masyarakat daerah di sekitarnya.<sup>38</sup>

Dalam makalah yang berjudul “pengaruh Pendidikan Agama terhadap Kehidupan Sosial” Soedjatmoko memberikan kesimpulan bahwa pendidikan agama akan dapat memenuhi suatu fungsi yang sangat penting dalam perkembangan sosial yang ada di Indonesia, bila:

---

<sup>36</sup> Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna*, (Jakarta:Pustaka Ciganjur, 1999), 38-39

<sup>37</sup> Abd A'la, *Pembaruan Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 2

<sup>38</sup> Abd A'la, *Pembaruan Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006),

- a) Berusaha menumpuk beberapa sifat tertentu, antara lain: keberanian hidup, bersedia mandiri, berinisiatif, peka terhadap hak dan keperluan manusia, sanggup kerjasama untuk kepentingan umum di dalam proses perubahan sosial yang jalan terus menerus, serta tanpa mempunyai rasa takut akan perubahan
- b) Berusaha merangsang anak didik untuk mengamalkan ilmu mereka
- c) Berusaha memupuk motivasi yang kuat pada anak didik untuk mempelajari dan memahami kenyataan sosial yang terdapat di masyarakat
- d) Berusaha untuk berintegrasi dan bersinkronasi dengan pendidikan non agama.<sup>39</sup>

Maka dari itu, lembaga pendidikan masyarakat termasuk pondok pesantren haruslah bersifat fungsional, sebab lembaga pendidikan sebagai salah satu wadah dalam masyarakat biasa dipakai sebagai pintu gerbang dalam menghadapi tuntutan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus mengalami perubahan. Untuk itu lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren perlu mengadakan perubahan secara terus menerus seiring dengan berkembangnya tuntutan-tuntutan yang ada dalam masyarakat yang dilayaninya. Pondok pesantren yang telah lama menjadi tumpuan pendidikan masyarakat “religiuss” tidak boleh mengabaikan tuntutan perubahan tersebut.<sup>40</sup>

Terlebih saat ini ada kecenderungan kuat di kalangan keluarga muslim untuk menyekolahkan anaknya di pesantren, baik karena alasan religious ataupun lingkungan sosial budaya. Fenomena satu sisi mneunjukkan bahwa lembaga pendidikan pesantren tengah mengalami semacam kebangkitan atau setidaknya menemukan popularitas baru.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), 17-18

<sup>40</sup> M. Sulthon, Moh. Khusnuridlo, *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006), 2

<sup>41</sup> Sulthon, Khusnuridlo, *Manajemn Pondok Pesantren dalam Perspektif Global*, 29

#### 4. Pengertian Kerjasama

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami.<sup>42</sup> Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.<sup>43</sup>

Sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren, mengatakan bahwa kerjasama berarti bersaa-sama untuk mencapai tujuan bersama. Satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama. Soerjono Soekanto menyatakan kerjsama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat tersebut sudah jelas mengatakan bahwa kerjasama merupakan bentuk hubungan antara beberapa pihak yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama.<sup>44</sup>

Menurut David Basrowi kerjasama merupakan proses sosial dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing.<sup>45</sup> Menurut Pamudji kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melakukan interaksi antar individu yang melakukan kerjasama sehingga tercaoi tujuan yang dinamis, ada tiga unsure yang terkandung dalam kerjasama yaitu orang yang melakukan kerjsama, adanya interaksi dan adanya tujuan yang sama.<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 156

<sup>43</sup> W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 492

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 66

<sup>45</sup> David Basrowi, *Pengantar Sosiologi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 145

<sup>46</sup> Pamudji S, *Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah*, 1985 (Jakarta: Bina Aksara), 12-13

Berdasarkan pengertian kerjasama dari para ahli diatas, kita bias menyimpulkan bahwa kerjasama adalah bentuk hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya yang saling berinteraksi dan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan kerjasama dan sistem informasi pendidikan dapat dilakukan dengan menempuh tahapan yaitu: tahap peninjauan, tahap penanda tangan kerjasama, tahap penyusunan program, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan.<sup>47</sup>

Ada beberapa cara yang menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati oleh dua orang atau lebih tersebut yaitu:

- a) Saling terbuka, dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik harus ada komasi yang komunikatif antara dua orang yang bekerjasama atau untuk orang lebih.
- b) Saling mengerti, kerjasama berarti dua orang atau lebih bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan, dalam proses tersebut, tentu ada salah satu yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapkan.

Oleh karena itu perlunya untuk kita santri Pondok Pesantren Darus Sa'adah menjalin kerjasama dengan masyarakat di Desa Hadipolo demi mengubah tatanan hidup masyarakat Desa Hadipolo yang awalnya minimnya pengetahuan Agama menjadi masyarakat yang lebih baik.

## 5. Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut “society” asal kata “socius” yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab yaitu “syirk” yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi.<sup>48</sup> Adanya saling bergaul itu tentu karena adanya bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain. Arti yang lebih khusus masyarakat disebut

---

<sup>47</sup> Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group), 279-288

<sup>48</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), 157

pula kesatuan sosial maupun ikatan-ikatan kasih sayang yang erat.<sup>49</sup> Kita masyarakat hanya terdapat dalam dua bahasa yakni Indonesia dan Malaysia. Kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang artinya berhubungan dan pembentukan suatu kelompok atau golongan.<sup>50</sup>

Masyarakat menurut para ahli Sosiologi adalah sebagai berikut:

- a) Mac Iver dan Page mendefinisikan masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan selalu berubah.
- b) Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.
- c) Selo Soemardjan dan Soelaiman menyebut masyarakat adalah tempat orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.<sup>51</sup>
- d) Karl Marx mendefinisikan masyarakat adalah sebagai suatu struktur yang menderita ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah.
- e) Emile Durkheim masyarakat adalah suatu kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya
- f) Max Weber masyarakat adalah sebagai suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.
- g) J.L Gillin masyarakat adalah sebuah kelompok manusia yang tersebar yang memiliki kebiasaan (habit), tradisi (tradition), sikap (attitude) dan perasaan persatuan yang sama.
- h) S.R. Steinmentz masyarakat merupakan kelompok manusia yang tersebar meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur.

---

<sup>49</sup>M. Munandar Soelaiman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Eresco, (Bandung: Eresco, t.th), 63

<sup>50</sup>Drs. Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi & Sosiografi* ( Jakarta, Bulan Bintang, 1976), 11

<sup>51</sup>Ari H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 14



- i) M.J. Heskovits masyarakat ialah sebuah kelompok individu yang mengatur, mengorganisasikan dan mengikuti suatu cara hidup (the way life) tertentu.
- j) Ralph Linton masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat terbentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan social dengan batasan tertentu.
- k) An-Nabhani masyarakat adalah sekelompok individu seperti manusia yang memiliki pemikiran perasaan, serta sistem atau aturan yang sama dan terjadi interaksi antara sesame karena kesamaan tersebut untuk kebaikan masyarakat itu sendiri dan warga masyarakat.
- l) Adam Smith mengatakan bahwa masyarakat dapat terdiri dari berbagai jenis manusia yang berbeda, yang memiliki fungsi yang berbeda (*as among different merchant*), yang terbentuk dan dilihat hanya dari segi fungsi bukan dari rasa suka maupun cinta dan sejenisnya dan hanya rasa untuk saling menjaga agar tidak saling menyakiti *may subsitst among different men, as among different merchants, from a sense of its utility any mutual love or affection, if only they refrain from doing injury to each other.*
- m) Richard T. Schaefer dan Robert O. Lamm masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dan orang-orang di luar wilayah itu dan memiliki budaya yang relatif sama.
- n) John J. Macionis masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah wilayah tertentu dan memiliki busaya bersama.
- o) Paul B. Horton masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri dengan bersama dalam jangka waktu cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama dan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu.
- p) Talcott Parsons menambahkan kriteria kelima dari pendapat Marion Levy yaitu melakukan sosiolisasi terhadap generasi berikutnya

- q) Gerhard Lenski dan Jean Lenski, tipe-tipe kelompok masyarakat tersebut adalah masyarakat pemburu dan pengumpul, masyarakat peladang dan peternak. Masyarakat agraris, masyarakat industry dan masyarakatpasca industri.
- r) Soerjono Soekanto masyarakat pada umumnya mempunyai ciri-ciri dengan kriteria seperti:
- 1) Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang
  - 2) Bercampur atau bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia baru. Sebagai akibat dari hidup bersama, timbul sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia
  - 3) Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan
  - 4) Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu sama lain.

Masyarakat dalam pengertiannya merupakan sejumlah orang yang menetap ataupun tinggal pada wilayah yang sama dan memilih adat budaya yang relatif sama. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwasanya masyarakat merupakan sekelompok manusia yang berkepentingan sama dan memiliki budaya serta lembaga yang khas.<sup>52</sup> masyarakat secara istilah sendiri berakar dari bahasa arab yakni Syakara yang berarti “ikut serta”, berpartisipasi”. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang “bergaul” atau dengan istilah ilmiahnya “saling berinteraksi”.

Masyarakat menurut Hasan Shadily merupakan golongan besar atau kecil yang terdiri atas manusia dengan atau karena dirinya sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu dengan yang lainnya.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Dedeh Masryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta, Penerbit Deepublish CV Budi Utama, 2019), 2

<sup>53</sup> Lutfiatul Fatmah, *Metode Dakwah Bil Hal Oleh Gerakan Pemuda (GP) Ansor dalam Membentengi Masyarakat Muslim dari Gerakan Misionaris Kristen Desa Melung Kecamatan KedungBanteng Kabupaten Banyumas*, (Scripsi, IAIN Purwokerto, 2019), 26-27, Diakses pada 10 Februari 2022, [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=lutfiatul+fatmah&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=lutfiatul+fatmah&btnG=)

Menurut Linton, masyarakat dapat didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat terbentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat sikap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan social dengan batasan tertentu.

Hubungan pondok pesantren dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara pondok pesantren dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan dan kegiatan pendidikan dan di pondok pesantren serta mendorong minat dan kerja sama antara pondok pesantren dan masyarakat dalam rangka peningkatan dan pengembangan pondok pesantren. Lebih lanjut Kindred, Bagin dan Gallagher mendefinisikan hubungan pondok pesantren dengan masyarakat tersebut sebagai usaha kooperatif untuk menjaga dan mengembangkan saluran informasi dua arah yang efisien serta saling pengertian antara pondok pesantren, personalia pondok pesantren dengan masyarakat:

- a) Bahwa hubungan pesantren dengan masyarakat terjadi karena adanya kepentingan yang sama antara pondok pesantren dengan masyarakat
- b) Untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut, masyarakat perlu berperan serta dalam mengembangkan pondok pesantren
- c) Untuk meningkatkan peran serta masyarakat tersebut diperlukan kerjasama yang baik melalui komunikasi dua arah antara pondok pesantren dengan masyarakat secara efisien.

Dikaitkan dengan hal diatas, masalah yang lebih urgent mengenai hubungan pondok pesantren dengan masyarakat dapat didefinisikan sebagai segenap upaya untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengefektifkan usaha kooperatif antara pondok pesantren dan masyarakat agar terdapat hubungan timbal balik yang harmonis dikemudian hari.

## B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan kepustakaan yang peneliti lakukan, kajian mengenai penerapan etika sosial santri di pondok pesantren Darus Sa'adah dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat di Desa Hadipolo Jekulo Kudus, belum ada yang mengkajinya. Akan tetapi sudah ada hasil karya yang relevan dengan peneliti ini. Hanya objek yang dikaji sangatlah berbeda. Hasil karya yang berupa laporan penelitian<sup>54</sup> individu antara lain:

1. Penelitian Arda Dwi Rahayu, yang berjudul “Etika Kepesantrenan Santri di Pesantren Mahasiswa An-Najah Purwokerto” penelitian ini fokus pada penerapan nilai dasar etika kemanfaatan, keamanan dan tanggungjawab. Menggolongkan etika pesantren An-Najah sebagai etika Utilitarianisme. Relevansi penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penerapan etika di Pondok Pesantren, perbedaan antara skripsi Arda Dwi Rahayu dan skripsi peneliti dalam fokus penelitiannya pada Penerapan Etika Sosial santri di Pondok Pesantren Dalam Menjalinkan Kerjasama dengan Masyarakat di Desa Hadipolo Jekulo Kudus.
2. Penelitian tesis yang berjudul “Peranan Pondok Pesantren dalam Pembinaan Akhlak Santri (Penelitian di Pondok Pesantren Al-Barokah Rancapaku Padakembang Kab. Tasikmalaya” ditulis oleh Zamzam Abdul Kudus. Penelitian ini menggali tentang akhlak para santri yang terlihat kurang memiliki kesadaran dan tanggungjawab, serta tidak menaati tata tertib pondok. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode field research dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi.<sup>55</sup> Sekilas penelitian yang ditulis oleh Zamzam Abdul Kudus tersebut memiliki kesamaan

---

<sup>54</sup> Arda Dwi Rahayu, “*Etika Kepesantrenan Santri di Pondo Pesantren Mahasiswa An-Anajah Purwokerto*”, (Skripsi: IAIN PURWOKERTO, 2016), diakses pada 10 Februari 2022, pukul 22.30

<sup>55</sup> Zamzam Abdul Kudus, “*Peranan Pondok Pesantren dalam Pembinaan Akhlak Santri: Penelitian di Pondok Pesantren Al-barokah Rancapaku Padakembang Kab. Tasikmalaya*”. Tesis Magister, (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2012)

dalam hal fokus kajian dengan penelitian ini. Namun, objek dan tempat penelitian keduanya jelas berbeda. Penelitian Zamzam Abdul Kudus mengambil tempat penelitian di Pondok Pesantren Al-barokah Rancapaku Padakembang Kabupaten Tasikmalaya. perbedaan dengan skripsi peneliti membahas etika sosial santri di Pondok Pesantren Darus Sa'adah karna di tempat yang diteliti ini etika sosial disini sangat minim untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhayati berjudul “Sikap dan Perilaku Santriwati XI Tingkat Madrasah Aliyah Terhadap Peraturan Kedisiplinan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak”. Dari penelitian yang telah dilakukan Siti Nurhayati menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa konsep tata tertib yang ada di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak sudah memenuhi syarat-syarat. Sebab, tata tertib tersebut sudah dijadikan peraturan baku yang dijadikan undang-undang bagi setiap santriwati yang didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban serta sanksi bagi santriwati yang melanggar. Semuanya sudah disesuaikan dengan kemampuan santriwati sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menaatinya, dari pelanggaran yang bersifat ringan hingga berat. Santriwati yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan akan mendapatkan sanksi tersendiri sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.<sup>56</sup>

Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian yang Siti Nurhayati tersebut yaitu fokus penelitian, fokus penelitian yang dilakukan Siti Nurhayati adalah sikap dan perilaku sehari-hari, sedangkan peneliti mencari bagaimana usaha pesantren dalam membentuk etika sosial santri supaya santri disiplin. Persamaanya adalah pada metode pengumpulan data dan analisis data.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Krismono, Achmad Kurniadi yang berjudul “Pembinaan Sikap Religius dan Etika Sosial Pada Santri Di Pondok Pesantren Sekar Putih Dusun Blembeng Desa Purwodadi Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang 2020”. Fokus penelitian Krismono

---

<sup>56</sup> Siti Nurhayati, *Sikap dan Perilaku Santriwati XI Tingkat Madrasah Aliyah Terhadap Peraturan Kedisiplinan di Pondok Pesantren darul Huda Mayak*, Skripsi PDF, diakses 28 Juli 2022 Pukul 21.11 WIB

yaitu upaya yang dilakukan pondok pesantren Sekar Putih dalam Pembinaan Sikap Religius dan etika sosial.

Perbedaan penelitian peneliti dengan Krismono, peneliti fokus penelitiannya yaitu Penerapan etika sosial santri dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat di Desa Hadipolo.

5. Penelitian Abdul Haris Maulana dan Siti Maryam Munjiat yang berjudul “Keteladanan Kyai dalam Pembentukan Akhlak Sosial Santri Pondok Pesantren As-Sanusi Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon” fokus penelitian tersebut yaitu untuk memperoleh data tentang usaha kyai dalam membentuk kepribadian santri agar manusia yang berkpribadian Islam dengan Ilmu agamanya. Juga membentuk akhlak sosial santri seperti persaudaraan, rendah hati, dermawan, supel dan ramah, jujur, bertutur kata yang baik, memenuhi janji, saling menghormati dan toleransi.

Penelitian peneliti yaitu “penerapan etika sosial santri dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat di desa Hadipolo”. Penelitian Abdul Haris Maulana dan penelitian peneliti hampir sama, sama-sama membentuk kepribadian yang baik guna menjadi pribadi yang baik.

6. Penelitian Habibatul Jaliah yang berjudul “Mengembangkan Sekolah melalui jalinan hubungan sosial di pondok pesantren Tahfidzul Qur’an Syahronil Bariyyah Zulkarnain denga Masyarakat”. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui perkembangan sekolah melalui hubungan pondok pesantren tahfidzul qur’an syahronil bariyyah zulkarnain dengan masyarakat sekitar. Kemudian untuk menarik perhatian masyarakat dan bentuk hubungan masyarakat podnok pesantren dengan masyarakat sekitar.

Perbedaan penelitian peneliti dengan peneliti Habibatul Jaliah yaitu fokus mengembangkan sekolah melalui jalinan hubungan sosial sedangkan peneliti fokus penelitiannya adalah menerapkan etika sosial santri dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat di Desa Hadipolo Jekulo Kudus.

### C. Kerangka Berfikir

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang didirikan oleh dan untuk masyarakat secara mandiri dan berperan aktif dalam membentuk moral bangsa. Dalam hal ini keberadaan tokoh kharismatik dan figur ulama di pondok pesantren yang menjadi panutan dan disegani masyarakat sekitar. Pondok pesantren merupakan salah satu wahana sepiritual bagi santri maupun masyarakat, karena didalam kegiatan pondok pesantren kesehariannya tidak lepas dengan ajaran agama islam . misi utama pesantren adalah menerapkan etika sosial, karena didalamnya terdapat banyak santri yang hadir untuk mendalami ilmu agama. Santri nantinya diharapkan dapat menyebarkan ilmu yang telah didapatkan dipondok pesantren lebih luas lagi dengan binaan aqidah ilmu dan akhlak. Ilmu agama bukan hanya diajarkan di pondok pesantren, tetapi pondok pesantren juga memberikan kontribusi perubahan tentang wawasan keagamaan yang signifikan pada masyarakat setempat.

Kegiatan mengajar pondok pesantren di Darus Sa'adah merupakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara rutin sesuai jadwal yang telah dilaksanakan guna untuk mendekatkan masyarakat dengan pondok pesantren. Disini pondok pesantren membantu mengubah masyarakat Desa Hadipolo yang awalnya tidak mengetahui tentang ajaran agama Islam, jarang berkomunikasi dengan orang dengan baik, tidak tahu menahu soal mengaji kitab maupun Al-Qur'an sehingga dengan adanya pondok pesantren masyarakat bisa menjadi lebih baik pengetahuannya mengenai agama Islam.

Semakin berkembang pesatnya zaman, banyak sekali orangtua yang ingin memondokkan anaknya ke pondok pesantren tapi tidak tega jika anaknya kesulitan maka dipikirkan pondok pesantren yang nyaman dengan kualitas baik. Atas dasar salah satu faktor diatas dapat memicu sifat manja dan kurangnya moral pada diri sifat anak. Sifat itu yang akan diminimalisir di pondok pesantren. Karena di pondok pesantren santri akan bersosialisasi dengan banyak orang bukan hanya kepada teman sebaya tapi juga kepada masyarakat dan khalayak ramai. Dengan adanya hal tersebut guna terjalannya kerjasama yang baik antara santri dan masyarakat dari pihak pondok pesantren dan pribadi santri sendiri diharapkan mampu

mengembangkan moral dan etika ke arah yang lebih baik. Sebagaimana yang akan dilakukan oleh penelitian ini yakni mengenai penerapan etika sosial santri di pondok pesantren dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat di desa hadipolo jekulo kudus. Dalam kerangka berpikir ini dijelaskan secara lebih konkrit dan sistematis, bisa diperhatikan pada tabel dibawah ini.

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Berfikir**

